



Judul : Moratorium - BK DPR Ajukan Mekanisme Kunker
Tanggal : Rabu, 12 September 2012
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

MORATORIUM

BK DPR Ajukan Mekanisme Kunker

JAKARTA (Suara Karya): Badan Kehormatan, (BK) DPR akan mengajukan mekanisme moratorium kunjungan kerja dengan Pimpinan DPR secepatnya. "Nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR untuk membuat sebuah mekanisme yang lebih baik karena masalah ini sudah berulang-ulang. Kalau ini tidak ditangani nanti ada lagi masalah seperti ini," ujar Ketua BK M. Prakoso saat ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (11/9).

Pembicaraan tersebut jelas dia terkait beberapa mekanisme seperti, alasan Kunker apakah itu harus, apa anggota DPR yang ikut mesti sebanyak itu, dan lainnya. "Apakah perlu kesana atau bisa diganti dengan kegiatan lain sehingga tidak

perlu ke sana. Itu akan kita sampaikan ke pimpinan DPR," tambahnya.

Menurut dia, BK, segera melakukan evaluasi kedepannya. Sebenarnya, kecurigaan timbul karena tidak ada laporan hasil kunjungan kerja pada masyarakat. Alhasil muncullah istilah plesir anggota dewan karena kunker hanya dipandang kedok bagi anggota DPR untuk melancong keluar negeri.

Seharusnya, alasan mengapa kunjungan dilakukan disampaikan ke publik, lalu apa yang dipelajari danyang didapat dari sana sesudah kunjungan, juga harus dilaporkan. Oleh karena itu, BK akan mengusulkan perlunya laporan dibuat usai Kunker, yang berisi soal tujuan Kunker dan apa yang didapat

dari Kunker.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR juga mendorong DPR segera melakukan moratorium kunjungan-kunjungan kerja legislator ke luar negeri untuk tujuan studi banding yang dinilai kurang penting sebagaimana tuntutan masyarakat saat ini.

Dukung Moratorium

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menuturkan bahwa sebagai langkah awal pihaknya akan melarang para anggota fraksi turut serta kunjungan kerja ke luar negeri tersebut. "Kami setuju adanya moratorium kunker ke luar negeri itu," ujar Puan.

Dikemukakannya bahwa berbagai aspirasi masyarakat

yang menghendaki agar DPR segera menghentikan berbagai kunjungan kerja anggotanya ke luar negeri untuk tujuan studi banding itu akan menjadi bahan introspeksi internal FPDIP.

Puan menegaskan bahwa sepanjang tidak ada signifikansi dan urgensinya sama sekali untuk kunjungan ke luar negeri maka hal tersebut sama maknanya dengan pemborosan anggaran negara.

Namun demikian, Puan menambahkan, terhadap muhibah antarpemerintahan yang menjadi tugas-tugas Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dalam menjalin kerja sama dengan parlemen negara-negara lainnya tentunya tetap diperkenankan. (Rully)